

## Mekanisme Pendisiplinan Siswa di SMA Dalam Penegakan Tata Tertib Sekolah

Lisnawati\*, Nanang Martono, Elis Puspitasari

Univesitas Jenderal Soedirman, Indonesia

\*lisnawati013@mhs.unsoed.ac.id

### Abstract

*Various cases of violations of school rules show that one of the reasons is because students do not understand the contents of the rules. During this time students tend not to be involved in the formulation of the rules and only become the executor. This study aims to examine student involvement in enforcing school rules. This research was conducted using qualitative methods (field research) in a high school in Banyumas Regency, Central Java. Disciplining students at the school is a challenge in itself because most of the students come from the lower classes. The lower class is synonymous with harsh life demands that make it difficult to manage. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The research targets were determined purposively, namely school principals, counseling teachers, and students (OSIS chairmen and students who often violate the rules). The results of the study show that teachers carry out a series of disciplines by collaborating with school organizations such as OSIS, MPK, and other organizational activists in the process of formulating rules through joint forums, dissemination of rules offline and online, supervising students during departures and raids, and assessing student discipline individual or collective (class). Based on this, it can be concluded that the school has provided an open space for students to be involved in disciplinary mechanisms from the formulation to the implementation of school rules.*

**Keywords:** Rules; Students; Discipline; Habitus

### Abstrak

Berbagai kasus pelanggaran tata tertib sekolah menunjukkan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena siswa kurang memahami isi tata tertib. Selama ini siswa cenderung tidak terlibat dalam perumusan tata tertib dan hanya menjadi pihak pelaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan siswa dalam penegakan tata tertib sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif (*field research*) di salah satu SMA di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pendisiplinan siswa di sekolah tersebut menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar siswa berasal dari kelas bawah. Kelas bawah identik dengan tuntutan kehidupan yang keras sehingga membuatnya sulit untuk diatur. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sasaran penelitian ditentukan secara purposif, yaitu kepala sekolah, guru BK, dan siswa (ketua OSIS dan siswa yang sering melanggar tata tertib). Hasil studi menunjukkan bahwa guru melakukan serangkaian pendisiplinan dengan berkolaborasi bersama organisasi sekolah seperti OSIS, MPK, dan aktivis organisasi lainnya dalam proses perumusan tata tertib melalui forum bersama, sosialisasi tata tertib secara luring dan daring, pengawasan siswa saat keberangkatan dan razia, dan penilaian kedisiplinan siswa yang bersifat individu maupun kolektif (kelas). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah telah memberikan ruang terbuka bagi siswa untuk terlibat dalam mekanisme pendisiplinan dari perumusan hingga implementasi tata tertib sekolah.

**Kata Kunci:** Tata Tertib; Siswa; Disiplin; Habitus

## Pendahuluan

Tata tertib sekolah merupakan sebuah mekanisme pendisiplinan di sekolah. Tata tertib berfungsi sebagai alat pengawasan/kontrol siswa untuk meminimalisasi penyimpangan dan membiasakan sikap baik. Siswa pada dasarnya bukan hanya terlibat dalam penegakan tata tertib sekolah, melainkan dari awal perumusan tata tertib. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran bersama. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam proses perumusan tata tertib masih minim. Berdasarkan penelitian Tamimi et al. (2022) selama ini tata tertib sekolah dirumuskan dewan guru, kepala sekolah, dan komite. Sementara Solihuddin (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tim tata tertib yang terdiri atas guru dan staf bertanggung jawab secara penuh untuk menyusun tata tertib, membuat poin kriteria pelanggaran, menyosialisasikan tata tertib, dan membagi tugas dalam penanganan pelanggaran tata tertib. Trinawati (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa siswa tidak terlibat secara langsung dalam perumusan tata tertib, tetapi hanya berpartisipasi dalam pemberian masukan pada saat tata tertib tersebut telah dilaksanakan. Tiga penelitian tersebut tidak menunjukkan adanya keterlibatan siswa dalam penyusunan tata tertib sekolah.

Guru masih menjadi tokoh sentral dalam penegakan tata tertib di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian Zendrato & Lase (2022), Ermaningsih & Anomeisa (2019), Setiawan & Putra (2021), dalam praktiknya peran guru di antaranya yaitu sebagai pengawas, korektor, motivator, pembimbing, pemberi contoh, dan pengambil keputusan atas pelanggaran yang terjadi. Guru mengawasi proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ibadah siswa. Sebagai korektor, guru mendorong perubahan perilaku siswa dari perilaku buruk ke baik, sesuai dengan tata tertib. Sebagai pemberi contoh, guru mencitrakan dirinya sebagai pribadi yang disiplin waktu, seragam, beribadah, dan bertutur kata baik. Guru memotivasi dan membimbing siswa untuk menjadi pribadi yang patuh terhadap aturan. Guru menetapkan standar kedisiplinan siswa.

Siswa disiplin selama ini digambarkan sebagai siswa unggul, pintar, memiliki relasi sosial yang baik, dan berprestasi (Faiz et al., 2021; Hadiani, 2017; Rahmawati & Hasanah, 2021). Hasil studi yang dilakukan Purwandhasari & Mudzakir (2014) menyebutkan bahwa kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah akan memudahkan mereka mendapatkan prestasi (Oktasari et al., 2020). Siswa pintar dan berprestasi di sekolah inilah yang akan diberikan ganjaran. Prestasi dalam hal ini bukan diukur dari keberhasilan siswa menerapkan tata tertib, melainkan diukur dari nilai akademik dan nonakademik, seperti: juara kelas, juara lomba, cipta karya, menjabat di organisasi dan kepanitiaan. Di sisi lain, Fauzana dkk (2021) dalam penelitiannya menghasilkan temuan berbeda, bahwa perilaku negatif siswa tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Artinya tidak semua siswa berprestasi memiliki perilaku baik dan sebaliknya.

Di sisi lain, siswa hampir tidak pernah dilibatkan dalam perumusan tata tertib sekolah, mereka lebih sering menjadi objek tata tertib. Keterlibatan siswa yang minim dalam proses perumusan tata tertib dapat menyebabkan ketidakselarasan antara tata tertib dengan kebutuhan siswa. Siswa hanya berperan sebagai pelaksana tanpa mengetahui dasar tata tertib sekolah. Selain itu, perilaku tidak taat terhadap tata tertib masih dijumpai di sekolah, seperti terlambat datang ke sekolah, tidak disiplin tata berbusana, melawan guru, membuat kegaduhan di kelas, merokok, dan berkelahi (Aprilia et al., 2021). Pemahaman siswa yang kurang terhadap tata tertib dan menganggap remeh ketidakdisiplinan menjadi faktor yang melatarbelakangi pelanggaran tata tertib (Anzalena et al., 2019). Selain itu, sekolah masih diwarnai berbagai kasus pelanggaran berat seperti tindak kekerasan yang dilakukan antarsiswa, guru terhadap siswa, atau bahkan siswa terhadap guru. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak menunjukkan bahwa 67% siswa menyatakan pernah melakukan kekerasan, 27% guru laki-laki dan 17% guru perempuan menjadi pelaku kekerasan fisik di sekolah (Widodo, 2017). Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran tata tertib kategori ringan hingga berat masih banyak dijumpai di sekolah.

Studi terdahulu tentang pendisiplinan siswa dapat dikategorikan menjadi lima kategori studi yaitu: Pertama, guru dan perannya dalam pendisiplinan. Siswa disebut disiplin ketika ia mematuhi tata tertib sekolah dan bertanggung jawab atas perilakunya di sekolah, adapun peran guru dalam proses pendisiplinan yaitu sebagai pengawas, penghubung, pembimbing, dan pemberi sanksi (Setiawan & Putra, 2021; Ugurlu et al., 2015). Kedua, implementasi tata tertib sekolah. Implementasi tata tertib sekolah dilakukan melalui kegiatan keagamaan, upacara, penertiban waktu, model potongan rambut, dan cara berpakaian (Fawaid, 2017; Laugi, 2019). Mekanisme pendisiplinan dilakukan melalui panoptikon, normalisasi, dan pemberlakuan *reward* serta *punishment* bagi siswa. Adapun isi tata tertib siswa secara umum meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi bagi pelanggar tata tertib. Siswa bukan merupakan agen yang bebas, melainkan didisiplinkan dengan standar penampilan dan perilaku tertentu. Wang (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sekolah pada masyarakat modern lebih berperan membekali siswa keterampilan yang dibutuhkan industri. Sekolah berada dalam jaringan kekuasaan kapitalis. Sekolah bertujuan untuk mempersiapkan individu menjadi tenaga kerja. Budaya yang diajarkan di sekolah ditentukan dan disesuaikan dengan kepentingan kapitalis. Kapitalis merujuk pada kelompok kelas atas dalam sebuah struktur sosial. Berbagai standar penampilan dan perilaku siswa dalam tata tertib sekolah mengarah pada standar kelas atas.

Ketiga, faktor indisipliner siswa. Faktor indisipliner siswa menurut penelitian Anzalena et al., (2019) yaitu siswa kurang memahami tata tertib sekolah, menganggap *sepele* perilaku tidak disiplin, dan tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki diri. Selain itu, kesulitan ekonomi menyebabkan siswa tidak berseragam lengkap. Keempat, dampak tata tertib sekolah. Tata tertib membuat siswa lebih berhati-hati ketika bertindak, merasa selalu diawasi, dan memiliki kepekaan untuk mengingatkan teman yang melanggar tata tertib sekolah (Mabuka, 2021). Sementara Bell & Puckett (2020) menyatakan bahwa skorsing memiliki dampak negatif terhadap prestasi akademik siswa Afrika-Amerika, pasalnya mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran di kelas. Kelima, pendisiplinan dan diskriminasi. Siswa kulit hitam diawasi lebih ketat dan dihukum lebih cepat (Annamma et al., 2019), sementara siswa yang gagal melanjutkan studi cenderung diabaikan guru (Wang, 2021). Lima kecenderungan penelitian terdahulu belum menjelaskan mengenai keterlibatan siswa dalam proses penyusunan tata tertib sekolah.

Penelitian yang akan dilakukan bermaksud mengisi kekosongan kajian yang selama ini belum dilakukan peneliti terdahulu. Penelitian ini memfokuskan pada sejauh mana partisipasi siswa dalam proses pembuatan dan implementasi tata tertib sekolah. Asumsi penelitian ini bahwa keterlibatan siswa dalam perumusan tata tertib dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan kepedulian mereka terhadap penegakan tata tertib sekolah.

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Wangon di Banyumas, Jawa Tengah. SMA ini dipilih karena hampir tidak pernah terjadi pelanggaran berat yang dilakukan siswa di SMA tersebut. Tata tertib yang sering dilanggar seperti masih ditemukan siswa yang sering membolos dan terlambat masuk sekolah. Siswa di SMA tersebut sebagian besar berasal dari keluarga kelas bawah. Berdasarkan data pekerjaan orang tua siswa menunjukkan bahwa 222 dari 360 orang tua siswa terdata tidak bekerja, 17 orang tua bekerja sebagai buruh, 18 pedagang kecil, 11 karyawan swasta, 11 wiraswasta, 8 PNS/TNI/POLRI, 3 guru, dan 27 lainnya. Menurut Utari et al. (2019) kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan anak harus membantu orang tua mencari nafkah, sehingga

anak sulit berkonsentrasi, sering terlambat sekolah, tidak mengerjakan PR, ketiduran di kelas, tidak memiliki atribut lengkap, dan sering membolos. Latifah (Anisa Darania, 2020) menyatakan bahwa kemiskinan identik dengan kotor, malas, sulit diatur, tidak disiplin, dan kekacauan. Sementara standar penampilan dan perilaku siswa dalam pendisiplinan yang mengarah pada kelas atas dapat turut serta menjadi faktor ketidaksiapan mereka menyesuaikan diri dengan budaya disiplin di sekolah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pendisiplinan siswa di SMA dalam penegakan tata tertib sekolah?

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan proses pendisiplinan dalam penegakan tata tertib mulai dari perumusan hingga implementasi. Penelitian ini dilakukan di SMA di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan sekolah ini sebagai lokasi penelitian. Pertama, praktik indisipliner relatif rendah dan hanya berbentuk pelanggaran ringan seperti terlambat dan membolos. Kedua, latar belakang siswa di sekolah ini cukup beragam dari berbagai kelompok masyarakat, dari kelas sosial menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kelas bawah melalui pendisiplinan di sekolah dituntut untuk berpenampilan dan berperilaku mengikuti standar kelas atas. Oleh karena itu, praktik pendisiplinan di sekolah tersebut dapat dikatakan sudah cukup berhasil. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah yaitu Bu Asti Ningsih, guru BK yaitu Pak Carli Wibowo dan siswa. Siswa yang dipilih sebagai informan adalah ketua OSIS yaitu Very Damariski dan siswa yang sering melanggar tata tertib yaitu Seno Mahardika dan Andi Nurdianto. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif/*ongoing analysis*. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Disiplin dalam Perspektif Guru dan Siswa

Pelaksanaan pendisiplinan di sekolah melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Ketiganya berperan penting dalam serangkaian mekanisme pendisiplinan dari perencanaan hingga implementasi. Pemaknaan disiplin berdasarkan kaca mata pihak-pihak tersebut menjadi sangat penting, karena akan memengaruhi tindakan mereka dalam penerapan disiplin. Makna tersebut muncul dari interaksi sosial antarindividu dan dimodifikasi melalui suatu proses interpretasi, menjadi tindakan bersama yang dilakukan secara berulang-ulang dan melahirkan suatu kebiasaan (Ahmadi, 2008). Berikut pernyataan Bu Asti selaku kepala sekolah mengenai makna disiplin:

Menurut saya disiplin itu adalah suatu tindakan atau perilaku untuk taat terhadap aturan (Wawancara, 25 Mei 2023).

Pemaknaan disiplin tersebut merujuk pada kepatuhan terhadap aturan atau tata tertib sekolah. Tata tertib menjadi produk pendisiplinan siswa, digunakan sebagai pedoman berperilaku dan indikator kedisiplinan. Pemaknaan yang sama juga diungkap oleh Veri yang merupakan ketua OSIS:

Disiplin sebenarnya definisi terlebih dahulu, disiplin itu terkait dengan kita menaati sebuah aturan di tempat tertentu misalkan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Ini juga termasuk penerapan disiplin (Wawancara, 25 Mei 2023).

Bu Asti dan Very sama-sama memaknai disiplin sebagai tindakan patuh terhadap tata tertib. Siswa dikatakan disiplin jika dapat melaksanakan serangkaian kewajiban dan menghindari larangan seperti yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Pendisiplinan

merupakan tindakan untuk mengendalikan Siswa. Siswa dibuat untuk tidak berdaya dan menyesuaikan diri dengan berbagai aturan yang berada di luar dirinya. Pendisiplinan dilakukan secara terus-menerus untuk menginternalisasi dan mengonstruksi kepatuhan dalam diri mereka. Sebagaimana Martono (2014) mengungkapkan bahwa pendisiplinan merupakan mekanisme kekuasaan untuk membentuk tubuh terampil, berguna, dan patuh terhadap aturan. Tata tertib mengatur aktivitas sehari-hari di sekolah. Berikut pemaparan Bu A mengenai isi tata tertib:

Aktivitas sehari-hari di sekolah mulai dari aktivitas pembelajaran, tertib dalam mengikuti proses pembelajaran baik di ruang kelas maupun dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, kemudian terkait dengan tata tertib berpakaian dengan segala atributnya. Kemudian terkait dengan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait dengan misalnya ketika tidak boleh menggunakan perhiasan berlebihan, laki-laki berambut rapi, perempuan tidak boleh make up berlebihan atau membawa apa namanya tidak boleh berkelahi dan sebagainya. Jadi tata tertib itu tidak hanya terkait dengan proses pembelajaran tapi juga perilaku mereka di luar kelas terkait dengan berpakaian, perilaku mungkin ketika masuk kelas masuk sebelum jam 7 dan sebagainya (Wawancara, 25 Mei 2023).

Tata tertib setidaknya mengatur hak dan kewajiban dalam kegiatan sekolah, perizinan sekolah, sopan santun dalam pergaulan, seragam sekolah, larangan bagi siswa, peraturan kendaraan, penghargaan dan sanksi. Pendisiplinan dengan kontrol aktivitas ketat ini bertujuan untuk menghasilkan standar perilaku “baik” (Soleha, 2017). Siswa dari berbagai latar belakang ditundukkan dengan standar yang sama. Standar tersebut selanjutnya menentukan kualitas kedisiplinan siswa (siswa disiplin dan siswa tidak disiplin).

## **2. Keterlibatan Siswa dalam Mekanisme Pendisiplinan di Sekolah**

Serangkaian proses pendisiplinan dalam penelitian ini terdiri atas proses penyusunan tata tertib, sosialisasi tata tertib dan implementasi tata tertib. Keterlibatan siswa dalam serangkaian proses tersebut menjadi hal penting, agar tata tertib selaras dengan kebutuhan mereka. Artinya, penerapan tata tertib tidak bersifat satu arah yaitu dari guru ke siswa, tetapi perlu dikonsepsi atas kesadaran bersama. Penyusunan tata tertib menjadi kewenangan masing-masing sekolah. Penyusunan tata tertib di lokasi penelitian dilakukan secara rutin menjelang tahun ajaran baru. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tata tertib berdasarkan pernyataan Veri selaku ketua OSIS yaitu:

Itu melibatkan seluruh perwakilan dari seluruh pengurus organisasi. Terus nanti dipimpin oleh pihak kesiswaan kira-kira yang ditambahkan mana, yang mau dibenahi mana. Itu nanti ditetapkan dan disahkan oleh para perwakilan pengurus organisasi tersebut (Wawancara, 25 Mei 2023).

Penyusunan tata tertib di lokasi penelitian telah melibatkan berbagai pihak yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan perwakilan siswa seperti: OSIS, MPK, pengurus organisasi lainnya, dan ketua kelas melalui forum bersama. Perwakilan siswa bertugas menampung aspirasi dan menyosialisasikan tata tertib ke siswa lainnya. Melalui forum, perwakilan siswa diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya dan menyepakati peraturan bersama. Meskipun dalam praktiknya, perwakilan siswa tersebut cenderung menerima aturan yang telah ada. Berikut pemaparan Veri saat terlibat dalam proses perumusan tata tertib.

Lebih ke oke oke aja sih, karena kan mereka tau kalau di sini kita sekolah ya buat disiplin itu ya lebih baik, kalau misalkan kosmetik dibebaskan mungkin akan terlalu bebas, jadi perlu diatur (Wawancara, 25 Mei 2023).

Veri yang terlibat dalam proses perumusan tata tertib memahami isi tata tertib dengan baik. Berikut pemaparannya mengenai isi tata tertib.

Untuk tata tertib itu dimulai dari jam keberangkatan, dalam kita berpakaian, terus larangan-larangan tentang kosmetik dan perhiasan, dan perilaku (Wawancara, 25 Mei 2023).

Di sisi lain, proses perumusan ini tidak cukup terbuka terhadap siswa yang tidak menjabat di organisasi sekolah ataupun ketua kelas seperti yang dialami Seno dan Andi. Keduanya tidak mengetahui kapan pembuatan tata tertib atau tidak pernah diajak dalam proses perumusan tata tertib. Mereka mengetahui tata tertib, setelah ada sosialisasi. Ketidakterlibatan mereka dalam proses perumusan tata tertib membuat mereka kurang memahami substansi tata tertib sekolah. Keduanya juga kurang tertarik untuk membaca lembar tata tertib yang ada di kelas. Menurut Seno lembar tata tertib yang kompleks membuatnya malas untuk membacanya. Mereka mengetahui tata tertib setelah ada sosialisasi. Namun keduanya tidak memahami tata tertib secara komprehensif.

Sosialisasi tata tertib dilakukan setelah ditandatangani kepala sekolah. Sosialisasi bertujuan untuk memastikan seluruh siswa mengetahui dan memahami substansi tata tertib sekolah. Sosialisasi dilakukan secara luring ke kelas-kelas oleh OSIS dan MPK, melalui pengumuman setelah upacara hari Senin oleh guru, dan secara daring melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Saat sosialisasi tata tertib sekolah, siswa cenderung menerima tata tertib tersebut. Tidak terjadi proses negosiasi dalam sosialisasi tersebut.

Foucault menggunakan istilah *disciplinary power* untuk menganalisis penguasaan institusi terhadap tubuh individu pada masyarakat modern. Pitsoe (2013) dalam *Foucault's Discourse and Power: Implications for Instructions Classroom Management*, menyatakan bahwa lembaga pendidikan memiliki sejarah, nilai, dan norma yang sudah ada dan menentukan praktik relasi sosial di dalamnya. Praktik relasi kuasa di sekolah beroperasi secara tidak tampak, tidak disadari, dan seakan-akan dinormalisasi siswa. Dalam konteks penelitian ini relasi kuasa beroperasi melalui pendisiplinan. Melalui tata tertib, sekolah dapat mengendalikan siswa. Tata tertib sekolah menjadi serangkaian aturan yang diwariskan secara turun temurun dan cenderung dimaknai sebagai aturan yang wajar untuk dipatuhi dan dilestarikan di sekolah. Guru tidak memberikan alasan yang mendasari pembuatan tata tertib. Siswa cenderung menerima dan mengikuti tata tertib yang ada agar tidak terkena hukuman. Guru dengan pengetahuannya diputuskan sebagai kebenaran oleh siswa. Pengetahuan digunakan oleh sekelompok minoritas (baca: guru) yang memaksakan gagasan mereka tentang apa yang benar pada mayoritas (baca: siswa). Pengetahuan merupakan bentuk kekuasaan. Kekuasaan beroperasi melalui wacana/diskursus pengetahuan dalam relasi sosial. dan berada dalam ruang lingkup strategis (Syafiuddin, 2018). Kekuasaan bersifat produktif, menyebar, dan dinormalisasi dalam praktik pendisiplinan (Mudhoffir, 2013).

Adapun proses implementasi tata tertib merujuk pada tiga mekanisme pendisiplinan menurut Foucault. Terdapat tiga cara dalam mekanisme pendisiplinan yaitu dilakukan melalui pengawasan bertingkat, normalisasi (standar perilaku yang baik), dan ujian (penentuan siapa yang akan diganjar dan siapa yang dihukum) (Martono, 2014). Berikut penjelasannya:

a. Pengawasan Bertingkat

Pendisiplinan di sekolah menurut Foucault mirip seperti sistem penjara panoptikon. Bangunan sekolah dibentuk seperti penjara, agar guru dapat mengawasi siswa dengan mudah. Sekolah sebagai tempat pendisiplinan dikonsepsi sebagai gedung berpagar tinggi, tertutup, dan terpisah dengan lingkungan sekitar. Siswa berada dalam pengawasan yang ketat selama di sekolah mulai dari masuk ke gerbang sekolah, berada di dalam sekolah, hingga keluar dari gedung sekolah. Siswa dikontrol sedemikian rupa seperti jam masuk,

jam istirahat, dan jam pulang. Kegiatan pembelajaran di lokasi penelitian dimulai jam 07.00. Siswa harus datang ke sekolah jam 06.45, kemudian mengikuti kegiatan amaliyah selama 15 menit seperti membaca iqro dan asmaul husna. Setiap pagi terdapat guru piket, patroli keamanan sekolah (PKS), dan OSIS yang berdiri di gerbang sekolah. Mereka mengawasi siswa dari mulai jam kehadiran, kelengkapan seragam, rambut, dan kendaraan yang dipakai. Berikut pemaparan Veri mengenai aktivitas pengawasan siswa di gerbang sekolah.

Itu yang jaga di gerbang, MPK sama OSIS itu berjaga, jika ada yang tidak mematuhi aturan itu langsung dicatat, terus misalkan sepatunya misal hari senin itu warna putih, itu langsung disita. Pulangnya nanti dikembalikan lagi (Wawancara, 25 Mei 2023).

Siswa yang melanggar tata tertib akan dicatat dan diberikan poin pelanggaran. Poin pelanggaran tersebut akan menentukan tingkatan sanksi yang diberikan oleh sekolah yaitu peringatan secara lisan jika poin pelanggaran mencapai skor 25, peringatan kedua jika mencapai skor 50, peringatan ketiga jika mencapai 75, dan siswa dikembalikan kepada orang tua jika poin pelanggaran mencapai skor 100. Pengawasan tata tertib di lokasi penelitian juga terimplementasi melalui razia. Berikut pemaparan Bu Asti berkaitan dengan bentuk-bentuk razia.

Insidental sih, ya paling rutinnya itu berapa bulan sekali misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Razia HP, kosmetik, kalau yang dibawa hanya sekedar bedak tabur itu gapapa untuk mengantisipasi agar tidak berlebihan (Wawancara, 25 Mei 2023).

OSIS bertugas dalam proses razia tersebut. Mereka masuk ke masing-masing kelas, menggeledah tas, dan menyita barang-barang siswa yang tidak diperbolehkan dibawa ke sekolah. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaanlah yang bertugas menyimpan barang-barang sitaan tersebut.

#### b. Normalisasi

Normalisasi merupakan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk menentukan standar perilaku. Standar menggolongkan perilaku normal dan tidak normal (Aulianida et al., 2016). Standar perilaku normal yang dimaksud adalah perilaku yang diterima secara moral. Siswa diharuskan berperilaku sesuai standar seperti yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Normalisasi pada akhirnya membentuk tubuh yang disiplin yaitu tubuh yang mematuhi aturan dan kenormalan yang berlaku di sekolah. Sekolah menormalisasi penampilan dan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan siswa. Tujuan standar penampilan atau perilaku menurut Bu Asti yaitu:

Ya menurut saya itu sesuatu hal yang positif, yang pertama untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Bayangkan lah mbak misal anak masuk tidak ada aturan anak kan bisa semaunya, ada yang jam 7 ada yang setengah 8, nah kita ambil sisi positifnya tata tertib untuk membentuk keteraturan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Termasuk misalnya terkait dengan rambut ya kalau engga ya nanti modelnya macem-macem ada yang dicat dan lain sebagainya, pemakaian seragam satu sisi untuk keteraturan kemudian untuk identitas sosial juga, cuma menghindari apa itu istilahnya ya kesenjangan sosial (Wawancara, 25 Mei 2023).

Penetapan standar penampilan dan perilaku dipandang untuk menciptakan keteraturan di sekolah, identitas sekolah, dan menghindari kesenjangan sosial-ekonomi antarsiswa. Di sisi lain, standar penampilan dan perilaku dalam tata tertib bias dengan budaya kelas atas. Budaya ini dalam istilah Bourdieu disebut sebagai habitus. Habitus kelas atas diberlakukan untuk seluruh siswa tanpa memerhatikan latar belakang mereka. Siswa yang mayoritas berasal dari kelas di bawah dipaksa untuk mengikuti habitus kelas atas. Pemaksaan tersebut disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan dominasi struktur sosial yang berlangsung secara halus, tidak

disadari, diterima sebagai sesuatu yang wajar dan perlu dilestarikan (Amirulloh, 2018; Diyah & Imron, 2016; Ulfah, 2013). Kekerasan simbolik mengubah hubungan antara praktik dominasi dan ketundukan dalam sebuah hubungan yang lebih stabil.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk normalisasi yang ditemukan dalam lokasi penelitian:

Pertama, normalisasi pakaian dan atributnya. Tata tertib memaksa siswa untuk menggunakan seragam dan atribut lengkap seperti: sepatu, kaos kaki, dasi, topi, dan sabuk. Ketentuan seragam dan atribut yang berlaku di lokasi penelitian yaitu: 1) hari Senin dan Selasa: seragam OSIS, sepatu hitam polos, sabuk hitam polos, kaos kaki putih, dan kerudung putih instan menutup dada bagi siswa perempuan. 2) hari Rabu dan Kamis: seragam identitas, sepatu dan kaos kaki bebas, kerudung biru instan menutup dada bagi siswa perempuan. 3) hari Jumat: seragam pramuka, kaos kaki dan sepatu hitam polos, kerudung coklat tua instan menutup dada. Seragam sekolah dan atributnya menjadi identitas individu sebagai pelajar. Seragam menggambarkan kecerdasan, kecerdikan, kerapian, dan nilai tanggung jawab seorang siswa untuk belajar (Syifa & Haloho, 2022). Selama ini, penggunaan seragam sekolah bertujuan untuk menyamaratakan siswa dari berbagai kalangan kelas sosial. Namun, di balik tujuan tersebut, seragam merupakan habitus berpakaian kelas atas. Seragam berkerah menjadi simbol status kalangan bangsawan mulai pertengahan abad 14 di Barat. Berbeda dengan kelas bawah yang cenderung menggunakan pakaian lebih santai terutama untuk bekerja (Mutmainah, 2014). Identitas kelas atas dalam seragam diperjelas dengan penggunaan dasi. Dasi merupakan simbol kemapanan, kalangan kelas terdidik, dan kalangan menengah atas. Penggunaan seragam berdasi, atasan dimasukkan ke celana dengan dilengkapi sabuk, sepatu, dan kaos kaki mencerminkan penampilan kaum intelektual Eropa (Khasanah & Afianto, 2017). Saat ini, seragam berdasi juga menjadi simbol profesi orang-orang yang bekerja di kantor, bank, dan instansi lainnya. Pembiasaan penggunaan seragam dan atribut ini menyebabkan sebagian besar siswa memiliki cita-cita bekerja di kantor dengan gaji tinggi.

Kedua, normalisasi waktu. Sekolah mengatur jam masuk, istirahat, pulang, menyelesaikan PR, dan jumlah maksimal ketidakhadiran siswa. Jam masuk di lokasi penelitian adalah jam 06.45 dan pulang jam 16.00. Siswa terlambat tidak diperbolehkan masuk ke kelas, sebelum lapor ke guru piket. Bagi siswa yang tidak hadir lebih dari dua hari karena sakit harus menyertakan surat keterangan dokter. Peraturan waktu tersebut sejalan dengan peraturan di dunia kerja. Pekerja dikontrol agar dapat mencapai target kerja setiap hari. Maka dari itu, pekerja dikontrol sedemikian rupa agar tidak mengganggu produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah target yang dikejar kapitalis yaitu kelas atas. Pendisiplinan waktu di sekolah tidak mempertimbangkan keragaman latar belakang siswa. Siswa kelas atas mudah untuk hadir tepat waktu karena mereka memiliki fasilitas transportasi pribadi yang memadai. Berbeda dengan kelas bawah terutama yang bertempat tinggal di pelosok, harus berebut kendaraan umum karena akses transportasi yang sulit.

Ketiga, normalisasi model rambut dan riasan siswa. Tata tertib mewajibkan rambut siswa harus rapi, tidak melebihi alis, mengenai kerah baju, menutup telinga, dan tidak boleh dicat warna. Bagi siswa putri tidak diperbolehkan untuk memberi warna rambut, mencukur alis mata, menggunakan makeup berlebihan, bertato, dan bertindik. Rambut merupakan bagian simbol identitas individu. Gaya rambut laki-laki dan perempuan selama ini berada di bawah kontrol masyarakat. Sebagaimana pernyataan Synnot (Khumairoh, 2022) bahwa laki-laki dikonstruksi dengan potongan rambut pendek, sementara laki-laki yang berambut panjang dianggap telah keluar dari arus utama. Begitu pula di sekolah, laki-laki harus berambut pendek. Jika tidak, maka akan dikenai sanksi. Rambut selain dikonstruksi sebagai simbol pembeda gender, juga dapat merepresentasikan status sosial pemilikinya. Rambut pendek menggambarkan kerapian, kebersihan, dan kemampuan

ekonomi untuk mencukur rambut. Sementara, rambut panjang pada laki-laki sering diidentikkan dengan rambut masyarakat kelas bawah yang kurang memerhatikan kerapian dan kebersihan. Aspek kerapian dan kebersihan ini juga berkaitan dengan larangan bagi siswa menato tubuhnya. Tato dianggap dapat membuat tubuh menjadi kotor. Tubuh bertato juga menjadi citra kelas bawah sebagaimana pernyataan Fitriadi (2011), penampilan kelas bawah sering dicitrakan berpakaian sederhana, kumal, rambut kusam, bertato, dan bertindik. Penampilan-penampilan tersebut identik dengan penampilan pengamen, pengemis, preman, dan profesi-profesi kelas bawah lainnya. Di sisi lain, isi tata tertib juga menuai kontra dari siswa. Seno menyatakan bahwa dirinya merasa keberatan dengan aturan rambut yang diterapkan sekolah. Ia pernah terkena razia rambut meskipun rambutnya hanya terlihat berantakan. Selain itu ia menyatakan bahwa kewajiban bersepatu warna hitam tidak rasional karena tidak berkaitan dengan aktivitas belajar di sekolah.

c. Ujian (penentu siapa yang akan diganjar dan dihukum)

Standarisasi perilaku dan pengawasan ketat guru akan menentukan siapa siswa yang akan diberi ganjaran dan hukuman. Ganjaran atau penghargaan yang telah diterapkan yaitu diberikan kepada mereka yang berprestasi secara akademis dan nonakademis. Berikut pemaparan Bu Asti.

Ada, rewardnya yah ada diberikan apresiasi terhadap siswa yang baik. Yang berprestasi secara akademis dan nonakademis. Ke depannya ditambah lagi untuk siswa teladan, ini masih dalam proses. Kami memberikannya dalam bentuk piagam atau plakat (Wawancara, 25 Mei 2023).

Prestasi selama ini masih diukur melalui keberhasilan proses pembelajaran di kelas, mengikuti organisasi sekolah, dan keberhasilan berkompetisi (juara di bidang sains, olahraga, seni, dan lainnya yang mengharumkan nama sekolah). Adapun ganjaran bagi siswa disiplin bersifat kolektif atau perkelas. Kelas dengan jumlah kehadiran siswa tertinggi maka akan dikategorikan sebagai kelas paling disiplin. Kelas paling disiplin akan mendapatkan bendera oranye yang ditempelkan di depan kelasnya. Adapun mekanisme penilaian kelas disiplin menurut Bu Asti yaitu:

Mekanismenya itu kita ada penilaian yang dilakukan secara rutin periodik setiap minggunya terhadap kebersihan, kerapian, kehadiran sebagainya itu direkap. Itu kerja sama bapak ibu guru sebagai koordinator melaksanakan dengan siswa ada satgasnyalah yang melakukan penilaian. kemudian dinilai tiap minggu (Wawancara, 25 Mei 2023).

Adapun penerapan hukuman yang telah dilakukan berbentuk hukuman fisik dan nonfisik. Hukuman nonfisik yaitu seperti kegiatan amaliyah berupa membaca asmaul husna dan literasi bagi siswa yang terlambat ke sekolah dan menyanyi bagi siswa terlambat masuk kelas. Sementara itu, hukuman fisik diberikan jika pelanggaran dilakukan berkali-kali. Misalnya, jika siswa terlambat melebihi 3 kali, maka akan dihukum *push up*, *squat jump*, atau jalan jongkok ke kelas.

Kekuasaan mengontrol hukuman bagi tubuh pelanggar aturan. Hukuman yang diterapkan di sekolah diibaratkan mengalami dinamika yang sama seperti praktik hukuman di masyarakat. Foucault menguraikan perkembangan cara-cara hukuman dari masyarakat tradisional ke modern. Foucault menyebut cara sebagai teknologi. Teknologi hukuman pada zaman monarki dilakukan melalui eksekusi dan penyiksaan secara brutal, serta dipertontonkan ke masyarakat. Berbeda dengan teknologi hukuman pada zaman modern yaitu melalui pendisiplinan tubuh. Hukuman ditentukan oleh kuasa para profesional. Kekuasaan disalurkan melalui hubungan sosial, bersifat positif, dinormalisasi, dan dilegitimasi melalui regulasi. Sekolah modern menerapkan hukuman yang lebih rasional. Hukuman fisik yang sadis dan dipertontonkan di depan umum dialihkan menjadi hukuman yang bersifat tertutup, lebih manusiawi, mempertimbangkan pelanggaran, dan mendidik.

Hukuman diberikan guru kepada siswa tanpa memberikan pilihan. Misalnya, saat pelaksanaan razia rambut, siswa yang telah terdata berambut panjang akan dikumpulkan di lapangan setelah upacara hari Senin. Guru akan langsung memotong rambut siswa tanpa bertanya apakah siswa setuju rambutnya dipotong oleh guru. Siswa yang kabur akan dicari pengurus OSIS dan diminta kembali ke lapangan. Guru menentukan bagaimana perilaku yang diharapkan dari siswa dan menggunakan otoritasnya untuk menindak siswa. Penerapan tata tertib sekolah tersebut cenderung bersifat satu arah dan menunjukkan bahwa relasi kuasa antara guru dan siswa di sekolah tidaklah seimbang. Ketidakeimbangan tersebut disebabkan oleh ideologi dan kultur hierarki dalam sistem pendidikan. Aktor yang menempati hierarki lebih tinggi, memegang kuasa yang kuat. Aktor tersebut tidak lain adalah guru. Sebaliknya siswa menempati struktur hierarki di bawah guru, sehingga cenderung lemah.

Beberapa guru memperbolehkan siswa terlambat untuk mengikuti pembelajaran di kelas tetapi tidak dianggap hadir. Berikut pemaparan Seno yang pernah membolos saat jam pelajaran:

Iya meskipun lima menit di luar terus sudah ada guru di dalam kelas itu dialfa aja (Wawancara, 25 Mei 2023).

Hukuman pemberian alfa merupakan hukuman tegas bagi siswa, karena ia dinyatakan tidak mengikuti pembelajaran meskipun pada kenyataannya ia mengikuti setengah pembelajaran. Kegiatan siswa di sekolah dikontrol dengan ketat dan diatur dengan waktu-waktu tertentu. Sebelum jam istirahat, maka siswa diharuskan untuk tetap di kelas. Jika tidak demikian, maka siswa akan dihukum.

Sekolah menerapkan hukuman individual dan kolektif bagi siswa yang melanggar tata tertib. Hukuman individual diberlakukan untuk pelanggaran yang dilakukan secara individual seperti ketika siswa terlambat, membolos, berambut panjang. Sementara hukuman kolektif diberlakukan bagi kelas paling tidak disiplin yang diukur dari jumlah ketidakhadiran siswa. Program penilaian kelas tersebut merupakan program mingguan dari sekolah. OSIS bertugas untuk melakukan penilaian kelas dan hasilnya akan diumumkan saat upacara oleh guru. Kelas-kelas terpilih akan diberikan bendera dengan warna berbeda sesuai kategori. Bendera merah untuk kelas paling tidak disiplin, bendera oranye untuk kelas terdisiplin, bendera hijau untuk kelas terbersih, dan bendera hitam untuk kelas terkotor. Bendera tersebut harus dipasang di depan kelas-kelas terpilih.

Seno menyatakan bahwa kelasnya pernah dikategorikan sebagai kelas paling tidak disiplin, sehingga harus memasang bendera merah di depan kelasnya. Tanda tersebut membuat kelasnya sering diberi label oleh siswa kelas lain sebagai kelas buruk. Efek pendisiplinan tersebut menghasilkan dikotomi kelas disiplin dan tidak disiplin. Pendikotomian tersebut juga menimbulkan perbedaan perlakuan dari guru. Berikut pemaparan Seno.

Paling yang disiplin lebih diperhatikan oleh guru gitu, kalau siswa yang banyak melanggar aturan itu kaya dibiarin (Wawancara, 25 Mei 2023).

Siswa disiplin memiliki *privilege* tersendiri di sekolah seperti lebih dekat dengan guru-guru. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Veri berikut.

Iya lebih dekat sama guru, apa-apanya bisa jadi gampang. Ya gak gampang banget sih, tapi kaya lebih mudah karena kita udah dekat sama guru gitu (Wawancara, 25 Mei 2023).

Sementara siswa yang sering melanggar tata tertib cenderung diabaikan guru ketika proses pembelajaran di kelas. Berikut pemaparan Seno.

Engga ada, kalau misal yang sering melanggar itu kaya tidak dianggap gitu di dalam kelas. Kalau mau tidur ya dibiarin gitu (Wawancara, 25 Mei 2023).

Siswa yang melanggar tata tertib sekolah, cenderung akan tersingkirkan, terabaikan, dan terhukum oleh sistem. Siswa dengan label tidak disiplin cenderung diabaikan guru, tidak ditandai kehadirannya di dalam kelas, dilabel sebagai bagian dari kelas paling tidak disiplin, dan dicemooh sebagai kelas buruk oleh siswa kelas lain.

Sementara itu, pihak sekolah melalui BK bertugas untuk mendampingi siswa yang sering melanggar tata tertib di sekolah. BK dalam hal ini bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wali kelas, dan OSIS/MPK dalam proses pemantauan, pendataan, dan komunikasi dengan siswa-siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib. Berikut pemaparan Pak C mengenai peran tim BK di sekolah.

Kalau BK itu lebih ke bimbingan, pemantauan, supaya anak itu ketika ada suatu permasalahan atau kendala mereka merasa nyaman dulu untuk bercerita ke BK, selain itu juga tim BK ada kolaborasi dengan wali kelas ketika anak ada kendala misalnya terkait dengan pendisiplinan itu kerja sama dengan waka kesiswaan dan wali kelas, pendampingan supaya anak ada perubahan perilaku (Wawancara, 25 Mei 2023).

Data pendampingan terekam dalam buku perkembangan peserta didik. Jika pelaksanaan konseling dari tim BK tidak mendorong perubahan perilaku siswa, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua dan jika diperlukan, maka diarahkan untuk konseling ke psikolog. Dalam hal ini sekolah tidak bertanggung jawab terhadap pendanaan ke psikolog di luar sekolah. Sekolah hanya berperan dalam komunikasi dengan orang tua untuk mengarahkan anaknya berkonsultasi dengan psikolog.

### **3. Aktivistis Organisasi dan Spionase Siswa**

Pendisiplinan di sekolah bertujuan untuk memproduksi tubuh terampil dan patuh terhadap penguasa. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru dan organisasi sekolah seperti: OSIS, MPK, PKS, dan lainnya dalam proses perumusan tata tertib, pengawasan penerapan tata tertib, dan penilaian tata tertib. Siswa yang terlibat dalam perumusan dan pengawasan penerapan tata tertib di sekolah adalah para aktivis organisasi di sekolah. Sementara berdasarkan pembahasan sebelumnya, siswa yang tidak memiliki jabatan keorganisasian kurang terlibat dan hanya menjadi pelaksana tata tertib.

Mekanisme pengawasan oleh para aktivis organisasi dilakukan dengan spionase, yaitu pengawasan oleh siswa terhadap siswa lainnya. Menurut Foucault (Aulianida et al., 2016) spionase diibaratkan seperti panoptikon yang menjadi alat pemantauan. Kriteria siswa terpilih sebagai pelaksana spionase menurut Faiz et al. (2021) yaitu siswa yang memiliki kepintaran lebih, kekuatan fisik besar, dan siswa yang dipercaya guru. Dalam konteks penelitian ini, siswa terpilih adalah para aktivis organisasi. Para aktivis organisasi tersebut mengawasi siswa mulai dari penjagaan di gerbang sekolah saat jam keberangkatan. Mereka bertugas untuk mencatat siswa yang terlambat, tidak beratribut lengkap, atau melanggar tata tertib lainnya, kemudian melaporkannya kepada guru untuk ditindak lanjuti. Pada kasus lain, aktivis organisasi juga berperan mengawasi siswa yang dicurigai melanggar tata tertib sekolah dan akan menjadi sasaran saat pelaksanaan razia.

OSIS/MPK juga berperan dalam program penilaian kelas terdisiplin, terbersih, tidak disiplin, dan terkotor. Mereka bersama wakil kesiswaan memiliki otoritas dalam pengategorian kelas-kelas tersebut. Para aktivis organisasi terutama OSIS dan MPK memiliki modal pengetahuan, status, serta otoritas yang dianggap lebih besar daripada siswa lainnya di sekolah. Mereka melalui kekuasaannya dapat memberikan instruksi, melakukan pemantauan, dan menilai siswa lainnya.

## Kesimpulan

Mekanisme pendisiplinan dalam penegakan tata tertib dilakukan dengan berkolaborasi bersama ketua kelas serta organisasi sekolah seperti OSIS, MPK, PKS, dan lainnya. Para aktivis organisasi tersebut terlibat dalam proses perumusan tata tertib, sosialisasi tata tertib, pengawasan siswa, pelaksanaan razia, dan penilaian kedisiplinan kelas. Di sisi lain, siswa yang tidak terlibat dalam organisasi sekolah cenderung masih hanya menjadi pelaksana tata tertib. Siswa yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perumusan tata tertib, cenderung kurang memahami dan sering melanggar tata tertib. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan akses yang lebih luas bagi semua siswa untuk dapat terlibat dalam mekanisme pendisiplinan terutama saat perumusan tata tertib. Hal ini bertujuan agar tata tertib berangkat dari siswa dan selaras dengan kebutuhan siswa.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, D. (2008). Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar. *Jurnal Mediator*, 9(2), 301–316.
- Amirulloh, S. (2018). *Kekerasan Simbolik dalam Mewujudkan Ekosistem Pendidikan Kondusif di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Anisa Darania. (2020). Korelasi kemiskinan dan Kejahatan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 250–256.
- Annamma, S. A., Anyon, Y., Joseph, N. M., Farrar, J., Greer, E., Downing, B., & Simmons, J. (2019). *Black Girls and School Discipline : The Complexities of Being Overrepresented and Understudied*.
- Anzalena, R., Yusuf, S., & Lukman, L. (2019). Faktor Penyebab Indisipliner Siswa dalam Mematuhi Tata Tertib di Sekolah Dasar. *Jurnal PGSD*, 12(2), 123–132.
- Aprilia, Yuliatin, & Dahlan, H. (2021). Bentuk Perilaku Tidak Disiplin Siswa Kelas IX dan Dampaknya Terhadap Hasil Belajar (Studi di SMP N 6 Mataram). *Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 106–116.
- Aulianida, D., Liestiyasari, S. I., & Ch, S. R. (2016). Penggunaan Closed Circuit Television Sebagai Mekanisme Pendisiplinan di SMA N 2 Karanganyar. *SOSIALITAS: Jurnal Ilmiah Pendi. Sos Ant*, 5(2), 1–18.
- Bell, C., & Puckett, T. (2020). I Want To Learn But They Won ' t Let Me : Exploring the Impact of School Discipline on Academic Achievement. *Sage: Urban Education*, 1–31.
- Diyah, N. C. M., & Imron, A. (2016). Kekerasan dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan di Panti Rehabilitasi Sosial Anak). *Jurnal Paradigma*, 04(03), 1–12.
- Ernaningsih, D., & Anomeisa, A. B. (2019). Peran Guru PKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah. *BIRUNIMATIKA*, 4(2), 8–14.
- Faiz, F. R. F., Nurhadi, N., & Rahman, A. (2021). Pembentukan Sikap Disiplin Siswa Pada Sekolah Berbasis Asrama. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 309–326.
- Fauzana, S., Sudirman, & Yuhasnil. (2021). Hubungan Perilaku Negatif Siswa dengan Prestasi Belajar PKN Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban. *Jurnal Edukasi*, 01(01), 29–37.
- Fawaid, M. M. (2017). Implementasi Tata Tertib Sekolah dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Siswa. *Jurnal Civic Hukum*, 2(1), 9–19.
- Fitriadi, Ir. (2011). *Citra Diri Pengamen Pedesaan*. Universitas Sebelas Maret.

- Geng, W. (2021). *'Stupid and lazy' youths? Meritocratic discourse and perceptions of popular stereotyping of VET students in China*. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*.
- Hadianti, L. S. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa (Penelitian Deskriptif Analisis di SDN Sukakarya II Kecamatan Samarang Kabupaten Garut ). *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 2(1), 1–8.
- Khasanah, N., & Afiyanto, H. (2017). Identitas Penampilan Masyarakat Yogyakarta 1950'an-1970'an. *Kodifikasi*, 11(1), 211–228.
- Khumairoh, I. (2022). Rambut Sebagai Aspek Pendisiplinan Tubuh Perempuan: Studi Kasus Pada Biksuni Buddha Tantrayana-Tibetan. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 5(2), 21–28.
- Laugi, S. (2019). Penerapan Tata Tertib Sekolah untuk Membangun Disiplin Siswa di SMA Negeri 1 Konawe. *Shautut Tarbiyah*, 25(2), 239–258.
- Mabuka, O. (2021). Tata Tertib Sekolah Berperan Sebagai Pengendali Perilaku Siswa di SD Inpres Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(2), 360–372.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault; Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 18(1), 75–100.
- Mutmainah, A. (2014). *Representasi Fashion Sebagai Kelas Sosial dalam Film The Devil Wears Prada dan Confessions of a Shopaholic* [Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Oktasari, D., Yandri, H., & Juliawati, D. (2020). Analisis Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Oleh Siswa dan Peran Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 6(2), 16–21.
- Pitsoe, V., & Letseka, M. (2013). Foucault's Discourse and Power: Implications for Instructionist Classroom Management. *Open Journal of Philosophy*, 03(01), 23–28.
- Purwandhasari, T., & Mudzakir, M. (2014). Pendisiplinan Ideologis dan Represif di SMK Kal 1 Surabaya. *Paradigma*, 2(03), 1–8.
- Rahmawati, E., & Hasanah, U. I. (2021). Pemberian Sanksi (Hukuman) Terhadap Siswa Terlambat Masuk Sekolah Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Disiplin. *Indonesia Journal of Teacher Education*, 2(1), 236–245.
- Setiawan, D., & Putra, E. D. (2021). Peran Guru Dalam Menegakkan Tata Tertib Sekolah di SDN 006 Bukit Kapur Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 661–670.
- Soleha, D. (2017). Mekanisme Pendisiplinan Michel Foucault Studi Kasus Ketidaksiplinan Peserta Didik SMA YC Jakarta Barat. *2th Celscitech-UMRI*, 2, 1–12.
- Solihuddin, M. (2013). Dampak Kebijakan Sekolah Tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa dalam Membentuk Perilaku Siswa yang Berkarakter. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 1(2010), 62–70.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155.
- Syifa, S. A., & Haloho, H. N. Y. (2022). Penggambaran Masyarakat Kelas Atas di Korea Selatan pada Serial Class Of Lies. *PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema*, 5(1), 124–143.

- Tamimi, A. I., Hasan, N., & Madyan, S. (2022). Peran Kepengurusan IPNU dan IPPNU dalam Menjaga Tata Tertib di Madrasah Aliyah Fathul Hidayah Pangean Maduran Lamongan. *Vicratina*, 7(2), 8–16.
- Ugurlu, C. T., Beycioglu, K., Kondakc, Y., Sincar, M., Yildirim, M. C., Ozer, N., & Oncel, A. (2015). The Views Of Teachers Towards Perception Of Discipline In Schools. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 197(February), 120–125.
- Ulfah. (2013). Kekerasan Simbolik dalam Wacana Pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan INSANI*, 14(1), 51–58.
- Utari, N. D., Ulfah, M., & Warneri. (2019). Analisis Faktor Penyebab Ketidaksiplinan Siswa di SMA Santun Untan Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(3), 1–10.
- Wang, G. (2021). ‘ Stupid and lazy ’ youths ? Meritocratic discourse and perceptions of popular stereotyping of VET students in China. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 0(0), 1–16.
- Widodo, R. (2017). *Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia ( SR HAM ) : Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah*. 1–28.
- Zendrato, T. L. N., & Lase, B. P. (2022). Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Diri Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 124–138.